



**Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

Siaran Pers Nomor: 253/HUMAS PMK/X/2021

Enam Kementerian Sepakat Dukung Pelaksanaan Urusan Transmigrasi

KEMENKO PMK -- Transmigrasi merupakan upaya pemerintah untuk meratakan pembangunan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mensukseskan program transmigrasi ini perlu dukungan regulasi yang mumpuni, serta dukungan dari kementerian dan lembaga terkait.

Karena itu, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri) berinisiatif membuat "Berita Acara Kesepakatan Bersama Tentang Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi".

Sekretaris Kemendagri Y.B. Satya Sananugraha menyampaikan, kesepakatan bersama ini merupakan hasil koordinasi lintas kementerian yang didokumentasikan untuk dapat dijadikan rujukan dalam pelaksanaan program transmigrasi.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama Tentang Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi, pada Jumat (22/10), di Hotel Mercure Jakarta.

"Kesepakatan ini dapat dijadikan rujukan kedepan dalam merumuskan, menyelesaikan, dan mengendalikan kebijakan terkait transmigrasi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah," tuturnya.

Lebih lanjut, Sesmendagri menyampaikan, ditandatanganinya kesepakatan bersama yang merupakan regulasi sementara ini dikarenakan belum terbitnya Rancangan Peraturan Pemerintah terkait Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren (RPP PUPK) sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Tahun 2018, Kemendagri diamanatkan merumuskan 8 bidang urusan pemerintahan konkuren dan semua telah diselesaikan dengan baik. RPP PUPK tersebut adalah regulasi yang penting bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya termasuk bidang transmigrasi," terangnya.

Sesmendagri menyampaikan, adanya kesepakatan bersama tentang transmigrasi ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk terus memacu pembangunan menuju Visi Indonesia Emas 2045.

"Diharapkan, pelaksanaan urusan transmigrasi ke depan dapat bersinergi dan kolaboratif, mewujudkan penyelenggaraan transmigrasi yang fokus pada: peningkatan SDM, tata kelola kependudukan, pembangunan infrastruktur, penyerdehanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi masyarakat," tuturnya.

Sebagai informasi, Berita Acara Kesepakatan Bersama Tentang Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi ini resmi ditandatangani oleh enam perwakilan kementerian yang berkepentingan dalam pelaksanaan urusan transmigrasi.

Enam pihak yang menandatangani kesepakatan bersama tersebut yaitu: Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggualangan Bencana Kemenko PMK Sudirman, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT Rr. Aisyah Gamawati, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet Yuli Harsono, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto, Sesdirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, dan Direktur Regional 2 Perencanaan Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (*)

**Bagian Humas dan Perpustakaan,
Biro Hukum, Informasi dan Persidangan,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter@kemenkopmk
IG: kemenko_pmk**